



## **Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 di Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun**

### ***Implementation of Cash Social Assistance Programs in an Effort to Overcome Economic Problems Due to The Covid 19 Pandemic in Nagori Silou Huluan, Raya Sub-District, Simalungun Regency***

**Cynthia Lawrency Saragih, Beby Masitho Batubara, & Evi Yunita Kurniaty**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 telah berdampak serius pada perekonomian Indonesia, termasuk di Nagori Silou Huluan, yang menghadapi penurunan pendapatan dan meningkatnya jumlah masyarakat tidak mampu. Penelitian ini mengevaluasi implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai respons terhadap dampak pandemi ini di Nagori Silou Huluan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengacu pada enam indikator implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BST belum berjalan efektif. Proses pendataan tidak dilakukan dengan baik, menyebabkan beberapa yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, pencairan dana BST tidak memiliki jadwal tetap, yang berdampak pada ketidakpastian dalam pencairan dana yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Bantuan Sosial Tunai, COVID-19, Nagori Silou Huluan.

#### **Abstract**

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the Indonesian economy, including Nagori Silou Huluan, which has experienced declining incomes and an increase in the number of impoverished residents. This research evaluates the implementation of the Cash Social Assistance (BST) program as a response to the pandemic's impact in Nagori Silou Huluan. The research method used is qualitative descriptive, referring to six policy implementation indicators. The research results indicate that the implementation of BST has not been effective. The data collection process was not executed adequately, resulting in some eligible individuals not receiving assistance. Furthermore, the disbursement of BST funds lacks a fixed schedule, leading to uncertainty in accessing crucial funds for basic needs.

**Keywords:** Implementation, Cash Social Assistance, COVID-19, Nagori Silou Huluan.

**How to Cite:** Cynthia Lawrency Saragih, Beby Masitho Batubara & Evi Yunita Kurniaty (2023). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 di Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(2) 2023: 113-124



## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan terus hadir di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Masalah ini menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi, karena dampaknya yang luas dan serius terhadap masyarakat. Kemiskinan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Terlepas dari kemajuan teknologi dan sumber daya alam yang ada, banyak masyarakat di negara-negara berkembang masih menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang layak (Suyanto, 1996).

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan sangat kompleks dan beragam, melibatkan masalah struktural, sosial, dan ekonomi. Di banyak negara berkembang, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Selain itu, kurangnya peluang kerja yang layak, kurangnya pendidikan, dan masalah kesehatan juga berkontribusi terhadap kemiskinan (Bhinadi, 2017; Marnelly, 2012).

Upaya untuk mengatasi kemiskinan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, dan penciptaan lapangan kerja adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan (Mulyana & Zainuddin, 2017; Wijayanti & Muallidin, 2021). Meskipun tantangan mengatasi kemiskinan sangat besar, tetapi upaya-upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang miskin. Hal ini melibatkan komitmen bersama untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pandemi COVID-19 telah mengguncang perekonomian global dan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak signifikan dari pandemi ini adalah penurunan aktivitas perekonomian, yang berdampak pada kondisi keuangan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Ketika banyak usaha dan sektor ekonomi terpaksa mengalami penutupan atau pengurangan aktivitas, banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka atau menghadapi pemotongan gaji yang signifikan. Hal ini berujung pada kemunculan masyarakat baru yang menghadapi kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang sebelumnya tidak mereka alami (Alfikri et al., n.d.; Suharyanto et al., 2021; Tawai et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi ini, seperti pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak. Meskipun upaya ini penting untuk membantu mereka yang membutuhkan, tantangan tetap besar. Lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran merupakan dampak nyata dari penurunan aktivitas ekonomi yang tajam (Saputra et al., 2022).

Selain itu, pandemi ini juga telah mengungkap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Masyarakat menengah ke bawah, yang lebih rentan terhadap kerentanan ekonomi, mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kalangan elit. Ini mengingatkan kita pentingnya memperkuat sistem perlindungan sosial dan pendidikan keuangan yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya bersama untuk memperkuat ketahanan ekonomi, menciptakan peluang kerja baru, dan mengurangi kemiskinan harus menjadi prioritas agar masyarakat Indonesia dapat pulih dari dampak pandemi ini dengan lebih baik (Kadir & Lubis, 2019; Sitepu et al., 2019).

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 adalah langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis ini. Pandemi ini telah memberikan tekanan besar pada perekonomian nasional dan rumah tangga di seluruh negeri, sehingga program bantuan ini menjadi salah satu solusi yang diterapkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak (Hia et al., 2021)(Herlina et al., 2020; Mubaroq et al., 2023; Sianturi et al., 2021).

BST ini merupakan bagian dari berbagai program perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu ciri khas dari BST adalah penerima manfaatnya harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial

benar-benar tersalurkan kepada keluarga yang membutuhkan. Distribusi bantuan dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dan Bank Himbara, sehingga memungkinkan bantuan ini untuk disalurkan secara efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks pandemi ini, BST memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini membantu meringankan beban finansial keluarga yang mungkin kehilangan mata pencaharian atau pendapatan akibat pandemi. Meskipun BST merupakan langkah positif, tetapi tetap ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti proses pendataan dan distribusi yang efektif. Oleh karena itu, peran pemangku kepentingan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga yang terlibat sangat diperlukan agar program BST dapat berjalan dengan efisien dan efektif (Santi & Pinem, 2020)(Tua et al., 2020)(Saputra et al., 2022). Sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial, BST menjadi salah satu alat penting dalam mendukung masyarakat selama masa sulit ini. Terus meningkatkan kebijakan dan implementasi program seperti BST adalah langkah yang sangat penting untuk membantu masyarakat Indonesia melewati krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini.

Kebijakan adalah landasan utama yang mengatur jalannya suatu tindakan atau rencana dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan dapat bersifat formal, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, maupun bersifat informal, seperti pedoman atau prosedur internal dalam sebuah organisasi (Handoyo, 2012). Proses implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Meter dan Horn, adalah tahapan penting dalam menjalankan suatu kebijakan (Van Meter, 1975). Implementasi mengacu pada upaya nyata untuk mewujudkan kebijakan tersebut dalam bentuk tindakan konkret. Ini melibatkan penerapan sumber daya, manajemen pelaksanaan, dan pemantauan dampak kebijakan pada masyarakat atau organisasi yang terpengaruh (Winarno, 2008).

Dalam konteks pemerintahan, implementasi kebijakan bisa menjadi tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Proses implementasi harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti alokasi sumber daya, perubahan perilaku, dan pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dalam keseluruhan konteks ini, penting bagi para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan untuk memahami bahwa kebijakan bukan hanya tentang perumusan ide-ide, tetapi juga tentang bagaimana ide-ide tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Implementasi yang baik merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu kebijakan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat atau organisasi yang bersangkutan (Silalahi, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memahami dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2017).

Bogh dan Biklen (1975) dalam (Sugiyono, 2017) telah menggambarkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data berupa deskripsi naratif, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, serta mengeksplorasi sikap dan pandangan individu yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan ini lebih cocok digunakan ketika peneliti ingin mengungkap kompleksitas suatu fenomena atau memahami perspektif orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu.

Dalam konteks pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung situasi di Nagori Silou Huluan terkait implementasi program bantuan sosial tunai. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan, termasuk Kepala Nagori, Kepala Dusun, Operator Nagori, dan masyarakat setempat. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan hambatan dalam implementasi program tersebut. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan.

Dengan metode kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelaksanaan program bantuan sosial tunai di Nagori Silou Huluan, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dan pihak terkait dalam implementasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Nagori Silou Huluan

#### 1. Ukuran & Tujuan Kebijakan

Menurut (Van Meter, 1975), diidentifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah terealisasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

Melalui wawancara kepada Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan sebagai informan kunci mengatakan bahwa:

“Mengenai bantuan sosial tunai ini, belum bisa saya pastikan bahwa program bantuan sosial tunai tersebut berhasil. Dikarenakan yang mendata bukan pemerintah desa nagori silou huluan. Saya sebagai kepala desa nagori silou huluan hanya mampu mengukur bahwa dana bantuan yang diberikan kemensos telah diterima oleh masyarakat yang mendapatkan. Kemudian memberi arahan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk keperluan/kebutuhan hidup dan menggunakan uang tersebut dengan baik sesuai kebutuhan hidupnya. Kemudian tujuan kebijakan program ini adalah untuk membantu masyarakat agar tetap bertahan hidup pada masa pandemi covid-19 ini. Program yang sangat tepat dilakukan Kemensos terhadap masyarakat tidak mampu/miskin.” (Wawancara pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya kepada Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung sebagai informan utama mengatakan bahwa:

“Salah satu tujuan bantuan inikan untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin akibat covid-19. Tapi sasaran bantuannya masih ada juga yang tidak dapat padahal masih ada yang lebih pantas untuk mendapatkan bantuan itu. Dapat dikatakan bantuan sosial tunai belum menyeluruh yang dapat, mungkin bantuan nya dibatasi setiap desa serta yang mendata bukan gamot.” (Wawancara pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Hal ini juga ditambah dengan pernyataan dari informan utama Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku operator Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Bantuan sosial tunai ini program kemensos untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin yang pastinya ada syarat nya. Bantuan ini kan syaratnya terdaftar dalam DTKS dan bukan penerima bantuan sembako serta bantuan lainnya. Kami sebagai perangkat desa memberitahu kepada masyarakat bahwa bantuan tersebut digunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan hidup. Mengenai berhasilnya bantuan sosial tunai tersebut belum dapat dipastikan berhasil karena masih ada juga masyarakat yang lebih pantas mendapatkannya malah tidak dapat. Pendataan dilakukan oleh kemensos, kami perangkat desa hanya memvalidasi data nama yang dapat bantuan tersebut.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa indikator sasaran dan tujuan kebijakan sudah tercapai yaitu dana bantuan telah diterima oleh masyarakat. Namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masih ada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tunai padahal memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai ini memang sudah sampai ke kelompok sasaran, tetapi masih belum menyeluruh ke masyarakat yang berhak menerima.

Berdasarkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang didapat dari setiap informan bahwa pemerintah desa nagori silou huluan belum bisa memastikan bahwa program ini berhasil, karena bantuan tersebut masih belum tepat sasaran. Masih ada yang lebih memungkinkan untuk dapat bantuan malah tidak dapat. Pemerintah desa nagori silou huluan hanya memberi arahan pada masyarakat untuk menggunakan bantuan tersebut dengan sesuai kebutuhan hidupnya.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Maka perlu dipahami apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan yang ingin diterapkan, agar tujuan yang telah dibuat tidak salah sasaran.

Dengan adanya kesempatan bantuan yang diberikan Kementrian Sosial tentunya akan membuat masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok selama covid-19. Tujuan-tujuan yang diharapkan dengan adanya program bantuan ini dapat dipahami dengan baik oleh

seluruh pihak pelaksana agar menjadi nilai positif tersendiri untuk program bantuan sosial tunai tersebut.

## **2. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya financial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter, 1975).

Melalui wawancara kepada Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan sebagai informan kunci mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusianya pihak pelaksana yaitu Kementrian Sosial, pegawai yang bekerja sudah lulusan sarjana yang pasti memiliki kemampuan. Segi financial, penerima mendapatkan bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000 Dalam segi waktu, bantuannya tidak tentu perbulan nya keluar. Bisa dalam satu bulan uangnya cair Rp 600.000 tetapi bulan berikutnya bisa tidak keluar. (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung sebagai informan utama mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusianya pasti sudah lulusan sarjana. Bantuan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.300.00. Segi waktu bantuan ini tidak tentu datangnya.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Hal ini juga ditambah dengan pernyataan Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku Operator Nagori Silou Huluan sebagai informan utama mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia nya itu Kementrian Sosial karena ini program mereka. Dalam segi financial bantuan diberikan Rp. 300.000 kepada keluarga penerima manfaat. Dalam segi waktu, bantuan tidak tentu keluarnya dan kalau bantuannya cair penerima mengambil uangnya ke kantor Pos dengan membawa surat undangan yang diberikan pangulu serta membawa fotocopy kartu keluarga.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Dari indikator sumber daya yang didapat dari setiap informan bahwa Bantuan yang diberikan Kemensos kepada masyarakat sebesar Rp. 300.000 dan merupakan masyarakat tidak mampu serta terdaftar dalam DTKS. Kemudian dalam hal sumber daya manusia tidak memiliki kendala karena pegawai yang bekerja memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup. Sumber daya manusia dari pihak pelaksana yaitu Kementrian Sosial tentunya memiliki kapabilitas yang baik. Dalam hal mendata bantuan sosial tunai, sumber daya manusia nya adalah Kementrian sosial. Dalam segi waktu proses pencairan bantuan tersebut tidak tentu, bisa saja dalam satu bulan bantuannya dabel. Kemudian proses pengambilan uangnya pun harus ke kantor Pos.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dana bantuan untuk masyarakat tidak kekurangan, bantuan diberikan Rp 300.00. Hanya saja pengambilan dana bantuan yang cukup repot karena pencairan dana bantuan diambil di kantor Pos dan memakan waktu kurang lebih 2 jam.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, adanya ketidaktepatan waktu dalam proses pencairan dana bantuan karena tidak adanya dorongan dari pemerintah desa untuk mempercepat proses implementasi program bantuan sosial tunai ini. Padahal jika bantuan bergerak cepat tentu proses pencairan dana bantuan juga dapat dipercepat. Ketepatan waktu dalam implementasi program bantuan sosial tunai ini menjadi hal yang penting agar dapat tepat penggunaannya oleh masyarakat.

Namun, ada masalah yang muncul yaitu adanya ketidakadilan terhadap masyarakat yang tidak dapat bantuan ini. Padahal berhak untuk mendapatkan bantuan, terlebih lagi mereka lebih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Bantuan sosial tunai di Nagori Silou Huluan hanya 35kk yang dapat.

## **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi (Van Meter, 1975). Melalui wawancara kepada Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan sebagai informan kunci mengatakan bahwa:

“Dalam hal menyampaikan informasi tentang bantuan sosial tunai, kemensos mengirim data nama masyarakat yang dapat bantuan dan kita memanggil nama yang mendapatkan bantuan sosial tunai yang tentunya sudah kita validasi kembali data yang dikirimkan oleh Kemensos. Begitu juga dengan bantuan sosial lainnya, informasi nya diberikan ke setiap gamot disetiap dusun yang dipimpin untuk melakukan pendataan ke masyarakat di dusun yang dipimpinya.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya wawancara informan utama kepada Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung mengatakan bahwa:

“Untuk menyampaikan informasi tentang bantuan yang diberikan pemerintah. Saya selaku gamot rindung mendata langsung masyarakat saya yang tidak mampu. Akan tetapi dalam hal bantuan sosial tunai yang diberikan Kemensos, saya tidak mendata masyarakat dusun rindung. Karena tidak ada arahan juga diberikan pangulu ke setiap gamot lainnya. Karena memang pendataan dilakukan oleh Kemensos. Sehingga nama masyarakat yang mendapat bantuan pun ada yang salah seperti nik tidak valid, nama tidak lengkap.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Hal ini juga ditambah informan utama Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku Operator Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Berdasarkan bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu terutama pada bantuan sosial tunai ini adalah merupakan masyarakat tidak mampu dan bukan penerima bantuan lainnya. Perihal data yang dikirim Kemensos ke Nagori Silou Huluan mengenai bantuan sosial tunai tidak ada yang berubah, karena masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut orangnya itu-itu saja.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Dari indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang didapat dari setiap informan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pendataan yang dilakukan oleh Kemensos kepada masyarakat Nagori Silou Huluan. Karena akses menuju Nagori Silou Huluan yang tidak bagus. Mereka tidak mengetahui bahwa bantuan ini di data oleh Kemensos, sehingga data keluarga penerima manfaat tumpang tindih dengan penerima bansos, keluarga penerima manfaat yang telah meninggal, keluarga penerima manfaat dengan data ganda, nik tidak valid, dan pindah domisili. Jadi informasi yang kurang jelas bagi pemerintah desa serta jalur komunikasi para pelaksana dalam hal ini memicu ketidaktahuan pemerintah desa sehingga masyarakat yang tidak dapat padahal pantas dapat jadi salah paham terhadap bantuan ini. Sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, jalur komunikasi dalam implementasi program bantuan ini dimulai ketika para pelaksana program mengirim nama-nama penerima bantuan ke pangulu lalu pangulu memanggil penerima bantuan dan bantuan tersebut diambil di kantor Pos. Kemudian berdasarkan obeservasi yang dilakukan, informasi tersebut kurang jelas bagi pemerintah desa karena tiba-tiba mengirim nama-nama penerima bantuan tanpa ada pendataan dilakukan oleh pemerintah desa. ketidaktahuan informasi yang diberikan oleh pihak pelaksana berdampak pada masyarakat yang tidak mendapat dana bantuan.

Wawancara diatas dikuatkan oleh observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat dari beberapa perangkat desa dan masyarakat. Mereka tidak mengetahui bahwa bantuan ini di data oleh Kementrian Sosial. Jadi hal tersebut menjadi bukti bahwa ada informasi yang tidak sampai kepada perangkat desa. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Kementrian Sosial belum berjalan dengan efektif.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, dalam hal ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan (Van Meter, 1975).

Melalui wawancara kepada Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan sebagai informan kunci mengatakan bahwa:

“Semua pegawai yang bekerja dikantor pangulu sudah mempunyai tugas masing-masing. Kepala dusun yang bekerja dikantor pangulu Nagori Silou Huluan turut ikut dalam pendataan kepada masyarakat karena yang tahu masyarakat disetiap dusun itu ada yang tidak mampu adalah kepala dusunnya. Saya hanya memberi arahan untuk didata dengan benar. Segala bantuan yang

diberikan pemerintah kami sangat mendukung.” Wawancara dilakukan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya ditambah Informan Utama Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung mengatakan bahwa:

“Kami sebagai gamot selalu mendukung program pemerintah mengenai bantuan untuk masyarakat tidak mampu. Karena bantuan itu dapat membantu masyarakat. Apalagi bantuan yang dikeluarkan oleh Kemensos selama pandemic covid-19 sangat membantu masyarakat yang tentunya ada tujuan yaitu membantu masyarakat agar tetap bertahan hidup. Pada proses pendataan sebaiknya ditingkatkan lagi agar pendataan tidak salah sasaran.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Hal ini juga ditambah dengan pernyataan informan utama Bapak Muhtar Purba, selaku Operator Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Program ini tetap kami dukung karna tujuannya bagus untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin. Pokoknya segala bantuan dari pemerintah kami dukung karna dengan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat, apalagi disini masyarakatnya bekerja sebagai petani, dimana hasil panen nya tidak setiap hari. Dan sebagian ada yang bekerja diladang orang untuk mendapatkan upah.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam mengelola program ini pihak pelaksana tidak melakukan kerjasama dengan perangkat desa dalam hal mendata. Mereka hanya mengecek kembali data nama penerima bantuan yang dikirimkan oleh pihak pelaksana seperti apabila ada nik yang tidak valid, penerima sudah meninggal, dan penerima bantuan sosial tunai bukan penerima bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa tidak ada struktur organisasi dari pemerintah desa dalam proses pendataan bantuan sosial tunai tersebut karena pendataan dilakukan oleh Kemensos. Akan tetapi, program bantuan sosial tunai ini tetap didukung oleh pemerintah desa karena bantuan dari pemerintah dapat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk bertahan hidup pada masa covid-19. Bantuan tersebut pun sudah diterima oleh masyarakat yang mendapatkannya. Mengenai pendataan agar tetap ditingkatkan lagi agar bantuan tepat sasaran.

##### **5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-presepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Melalui wawancara kepada informan kunci Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Mengenai bantuan bantuan sosial tunai ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kemensos tentang bantuan sosial tunai. Artinya, pemerintah desa berupaya untuk meyukseskan program ini. Tetapi pemerintah desa tidak ada diberikan hak dan wewenang dalam perihal mendata masyarakat Nagori Silou Huluan yang tidak mampu untuk kategori bantuan sosial tunai ini. Ada utusan dari Kemensos yang ditugaskan untuk mendata langsung ke Nagori Silou Huluan, tetapi pendataan itu tidak ada dilakukan langsung. Karena kemungkinan besar hal itu dilakukan di atas meja bisa saja karena akses menuju Nagori Silou Huluan yang tidak bagus. Untuk bantuan sosial tunai ini harus dilakukan pendataan baru karena merupakan program yang baru dikeluarkan dari Kemensos. Bantuan itu tetap kami dukung.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya ditambah dari pernyataan informan utama Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung mengatakan bahwa:

“Kami sangat memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat Nagori Silou Huluan pada masa pandemic covid-19 ini. Dimana penghasilan menurun, apalagi pada saat baru munculnya virus covid-19 ini. Berbagai bantuan dari pemerintah pun keluar untuk membantu kehidupan masyarakat. Mulai dari bantuan sembako (berupa beras, minyak goreng serta kebutuhan sehari-hari) dan uang tunai. Program bantuan yang dikeluarkan pemerintah sangatlah membantu masyarakat tidak mampu, apalagi bantuan sosial tunai yang langsung dikeluarkan oleh Kemensos pada masa pandemic ini. Walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak dapat bantuan sosial tunai ini, bantuan lain dari pemerintah masih ada.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Hal ini juga ditambah dengan pernyataan informan utama Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku Operator Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Kami sebagai perangkat desa sangat memahami keluh kesah masyarakat. Namun, untuk bantuan sosial tunai ini kami tidak ada mendata. Kami hanya memvalidasi data nama yang mendapatkan bantuan tersebut yang diberikan Kemensos.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Kemudian dengan masyarakat Nagori Silou Huluan yang mendapatkan bantuan sosial tunai yaitu Ibu Minarlina Saragih sebagai informan tambahan mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat sangat mendukung bantuan sosial tunai ini dan bantuan itu dapat membantu kehidupan kami akibat covid ini dan bantuan ini kami gunakan untuk kebutuhan hidup kami seperti membeli beras, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Dari bantuan sosial tunai ini saya mendapatkan Rp. 300.000. Uang yang saya dapat dari bantuan ini saya gunakan untuk membeli kebutuhan. Bantuan sosial tunai maupun bantuan lain yang dikasih pemerintah sudah sangat membantu kami.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 12.00 WIB).

Selanjutnya ditambah dengan pernyataan informan tambahan Ibu Tiodora Sinaga sebagai masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu bagaimana alur pendataan bantuan sosial tunai ini. Saya tidak menerima bantuan itu padahal saya masyarakat tidak mampu. Seharusnya pemerintah mengutamakan masyarakat yang tidak mampu karena ini bantuan untuk masyarakat tidak mampu”. (Wawancara Jumat 28 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan indikator sikap/kecenderungan para pelaksana yang didapat dari setiap informan bahwa perangkat desa sangat memahami program yang dikeluarkan Kemensos pada masa covid-19 ini dan dimana tujuannya untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat dan pemerintah sangat menerima keluh kesah dari masyarakatnya.

Serta program bantuan sosial tunai ini diterima oleh pemerintah desa walaupun pendataan tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi pemerintah desa nagori silou huluan mendukung adanya program bantuan sosial tunai tersebut. Masyarakat nagori silou huluan juga mendukung bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin/tidak mampu.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial tunai ini tidak ada penolakan dari pemerintah desa. jadi semua mendukung program bantuan sosial tunai ini terutama pemerintah desa dan tetap mewujudkan tujuan untuk menyelesaikan implemetasi program bantuan sosial tunai ini.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Van Meter, 1975). Melalui wawancara kepada Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan sebagai informan kunci mengatakan bahwa:

“Di Nagori Silou Huluan ini kalau mengenai ekonomi bisa dikatakan sedang. Lingkungan sosial dalam hal ini masyarakat yang menerima bantuan adalah masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu serta terdaftar dalam DTKS. Kemudian langsung mendatangi kantor Pos untuk mengambil bantuan yang berupa uang tunai. Lingkungan politiknya, progress implementasi program bantuan ini ada pihak khusus dari Kemensos yang mendata.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya ditambah dengan Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung sebagai informan utama mengatakan bahwa:

“Kalau lingkungan ekonomi di Silou Huluan ini sedang, masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani. Menghidupi kebutuhan hanya dari hasil bertani diladang orang ataupun diladang sendiri. Lingkungan sosial masyarakat yang dapat bantuan mengambil langsung uang nya ke kantor Pos. Lingkungan politik disini bagi masyarakat Nagori Silou Huluan tidak begitu penting, hanya pada saat pemilu dan pilkades saja mereka ikut.” (Wawancara pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Hal ini ditambah dengan pernyataan informan utama Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku Operator Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Lingkungan Ekonomi di Silou Huluan ini sedang artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hiduplah. Lingkungan sosial Kemensos bekerja sama dengan kantor Pos kemudian masyarakat penerima mengambil uang nya ke kantor Pos. Serta lingkungan politik nya ada Kemensos yang mendata. Kami sebagai perangkat desa mendukung program bantuan ini. ” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).



Berdasarkan indikator Lingkungan ekonomi, sosial dan politik memiliki pengaruh terhadap proses implementasi program ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa program ini turut mendorong keberhasilan suatu implementasi. Mulai dari lingkungan ekonomi masyarakat yang pas-pasan cocok mendapatkan bantuan ini, lingkungan sosial yang juga turut mendorong keberhasilan suatu implementasi karena bekerja sama dengan kantor Pos Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga turut dalam implementasi program ini karena program ini didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Maka dari ke enam indikator dari teori Van Meter dan Van Horn dapat dikatakan bahwa setiap indikator dapat dijadikan dasar untuk melihat keberhasilan program ini. Pihak penyelenggara yaitu Kementerian Sosial dapat bekerja sama dengan seluruh pihak di pemerintahan mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, dinas sosial agar bekerja sama dengan baik, benar dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat tidak mampu/miskin. Agar kedepannya program bantuan sosial tunai maupun bantuan sosial lainnya dapat dilakukan secara terarah, terpadu sehingga program bantuan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dan tentunya akan bernilai positif bagi semua pihak.

### **Hambatan Kantor Pangulu Nagori Silou Huluan Dalam Program Bantuan Sosial Tunai Di Nagori Silou Huluan**

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada saat melakukan pendataan kepada masyarakat Nagori Silou Huluan. Dikarenakan petugas yang bekerja melakukan pendataan bukan merupakan perangkat desa yang bekerja di kantor pangulu. Melainkan pihak kemensos yang diutus kemensos untuk melakukan pendataan langsung ke Nagori Silou Huluan dan pendataan tidak dilakukan dengan turun langsung ke lokasi. Akan tetapi pendataan dilakukan diatas meja dan data masyarakat Nagori Silou Huluan didapatkan pihak kemensos dari camat. Dikarenakan akses menuju Nagori Silou Huluan tidak bisa dijangkau. Dalam arti, jalan menuju ke Nagori Silou Huluan tidak bagus serta transportasi yang susah. Sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Kepala Nagori Silou Huluan sebagai informan kunci mengatakan bahwa:

“Hambatannya itu kurangnya disumber daya manusia dalam proses pendataan, karena pendataan oleh Kementerian Sosial. Seharusnya pendataan itu dilakukan oleh Pemerintah Nagori Silou Huluan karena yang tau masyarakatnya tidak mampu adalah Pemerintah Nagorinya.”(Wawancara pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya ditambah dengan pernyataan Bapak Lepson Purba, selaku Kepala Dusun Rindung sebagai informan utama mengatakan bahwa:

“Hambatannya disumber daya manusianya itu adalah pihak Kementerian Sosial yang melakukan pendataan tidak melibatkan Pemerintah Nagori Silou Huluan. Akibatnya bantuan tidak tepat sasaran.” (Wawancara pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

Sarana dan prasarana nya kurang memadai. Contohnya dalam sarana seperti susah jaringan, computer kantor tidak ada hanya ada satu laptop kantor yang dipegang oleh operator desa. Contohnya dalam prasarana seperti transportasi menuju Nagori Silou Huluan yang jarang ada, jalan yang tidak bagus. Kemudian prasarana yang lainnya seperti ruang rapat, dan toilet. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku Operator desa mengenai hambatan mengemukakan:

“Sarana dan prasarana disini kurang memadai serta jaringan yang kurang mendukung. Di Nagori Silou Huluan ini jaringannya susah, karena Nagori Silou Huluan ini jauh dari kota raya dan termasuk desa pedalaman. Mendapatkan jaringan pun harus naik kebukit dan itupun jaringannya tidak penuh/lelet.” (Wawancara pada hari Jumat, 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya ditambah dengan pernyataan informan tambahan yaitu Ibu Ramesti Purba, selaku masyarakat Nagori Silou Huluan mengatakan bahwa:

“Kalau mau mengurus sesuatu itu kami langsung menjumpai kepala dusun kerumahnya kemudian kepala dusun yang menyampaikan ke kepala desa atau kalau kami perlu mengurus sesuatu langsung ke kepala desa, itu langsung kerumahnya. Kemudian akses ke nagori silou huluan tidak bagus.” (Wawancara pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 15.00 WIB).

### **SIMPULAN**

Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Nagori Silou Huluan dengan menggunakan indikator dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari indikator ukuran dan tujuan

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Bahwa Kementerian Sosial sudah menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin dengan menetapkan persyaratan bahwa terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Akan tetapi, dalam hal ini pangulu maupun perangkat desa Nagori Silou Huluhan tidak ada melakukan pendataan. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketidaktepatnya sasaran bantuan tersebut yang diterima pangulu nagori silou huluhan, dimana masih ada nama yang salah, nik tidak ada serta nama-nama yang mendapat bantuan itu-itu saja. Kemudian dapat dilihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak mampu tidak terdata dalam DTKS padahal pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Serta data diterima Kemensos dari kecamatan dan bisa saja itu data lama dan seharusnya data dilakukan ulang terhadap masyarakat tidak mampu di Nagori Silou Huluhan karena bantuan ini baru dikeluarkan Kemensos pada masa covid-19.

Hambatan dalam Penanganan Bantuan Sosial Tunai ini ialah kurang bagusnya akses menuju ke nagori silou huluhan. Sehingga Kemensos tidak melakukan pendataan langsung ke nagori silou huluhan. Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti transportasi yang susah, jaringan yang susah. Apalagi jaringan sangat susah untuk menginput data masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan lain yang diberikan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, M., Sumanti, S. T., Rasyid, A., Azhar, A. A., Abidin, S., & Suharyanto, A. (n.d.). *An Effects of Social Media on High School Students during the Covid-19 in Indonesia*.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Deepublish, 9.
- Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. S. S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153–161. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Perspektif*, 10(1), 128–139. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>
- Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Implementation of Assistance for Livable Houses for Underprivileged Communities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rok. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 174–183.
- Marnelly, T. R. (2012). Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1), 49–59.
- Mubarq, M. R., Hakim, L., & Rahman. (2023). Analisis Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia Analysis of Dynamic Relationships of Central and Local Government in Management of The Covid. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 36–45.
- Mulyana, N., & Zainuddin, M. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (Kasus Pelaksanaan CSR oleh PT Pertamina UP-IV Balongan). *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14212>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Santi, E., & Pinem, M. (2020). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara Analysis of the Implementation of the Family Hope Program in Bandar Sono Village, Nibung Hangus Dist.* 12(1), 75–82.
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Role Of The Village.* 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sei Kambing B. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Refika Aditama.
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings*

of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil.

Suyanto, B. (1996). *Perangkap kemiskinan: problem dan strategi pengentasannya dalam pembangunan desa*. Aditya Media.

Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>

Tua, N., Sihaloho, P., Silalahi, M., & Sujendra, B. (2020). *COVID-19 : Policy Evaluation to Protect Communities Through Social Safety Net*. 8(2), 124–133.

Van Meter, D. C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process". *Administration and Society*, 6(4), 4.

Wijayanti, R. S., & Muallidin, I. (2021). *Poverty Alleviation Efforts by Village Governments in Traji Village , Parakan District , Temanggung*. 9(1), 54–64. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.4116>

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **WEBSITE**

<https://apransiregar.wordpress.com>, diakses pada 20 Desember 2020).

<https://pelayananpublik.id>, diakses 21 Oktober 2020

<https://www.kemensos.go.id> diakses pada 29 Desember 2020

#### **Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun.